

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintah yang berdaulat kemudian syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negeri lain. Kemudian sebuah Negara juga tidak boleh lepas dari asas penyelenggaraan pemerintah di negara itu sendiri.

Khususnya di Indonesia penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki empat asas yaitu, sentralisasi, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Sentralisasi sendiri adalah dimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan atau kehendak dari pemerintah pusat, pada saat ini paradigma sentralisasi ini berubah menjadi desentralisasi atau kemitraan masyarakat mengenalnya dengan sebutan otonomi daerah.

Desentralisasi sendiri memiliki makna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diuatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Bidang anggaran BPKAD kabupaten Kuningan dalam wawancara menjelaskan bahwa realita dalam pelaksanaan pengambilan keputusan sendiri mengacu kepada pengambilan keputusan yang terstruktur, kemudian dalam perumusan anggaran sendiri dibentuklah TAPD dalam perumusannya. Dalam penyusunan APBD sendiri TAPD menyelenggarakan Musrembang desakecamatan dan kabupaten setelah hitung ke RKPD setelah hitung ke KUA yaitu kebijakan umum APBD, dalam kebijakan ini dibahas juga PPAS yaitu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, kemudian di himpunlah semua anggaran berdasarkan KKD kemampuan keuangan daerah karena pada dasarnya semua SKPD semua permintaannya ingin dipenuhi.

Dalam *Statement of financial Accounting concept No.2, Financial Accounting Standarts Board* mendefinisikan akuntansi sebagai system informasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Oleh sebab itu bukan lah hal yang mengherankan apabila *Accounting Education Change Commision* merekomendasikan bahwa kurikulum akuntansi harus menekankan bahwa akuntansi suatu proses identifikasi, pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi.

Komisitersebutmenyarankan agar
 akuntansiharusdirancanguntukmemberisebuahpemahaman yang
 kuatatastigakonsepdasarberikut 1).Pemakaiinformasididalampengambilkeputusan,
 2).Sifat, desain, pemakaiandanimplementasi SIA, 3).Pelaporaninformasikeuangan

Dibidangakuntansi, system
 pemrosesaninformasiakuntansiberbasiskomputerbanyakditawarkanolehperusahaanjas
 a yang bergerakdibidang system maupunpemerintah yang telahmemiliki system
 perencanaankeuangankhususdaerahdengantujuanuntukmemberikankemudahanbagipa
 raakuntanuntukmenghasilkaninformasi yang dapatdipercaya, relevan, tepatwaktu,
 lengkap, dapatdipahamidanteruji

Pasal 1 ayat 12 PeraturanPemerintah No 56 Tahun 2005
 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah
 menjelaskanKeuangandaerahadalahsemuahakdankewajibandaerah yang
 dapatdinilaidenganuangsertasegalasesuatubaikberupauangmaupunbarang yang
 dapatdijadikanmilikdaerahberhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut.

Untukmengelolakeuangandaerahsendiridiperlukannyasebuahsistematauaplikas
 iuntukmenjalankanpengelolaankeuangandaerah.Sistem yang berlaku di
 pemerintahini disebut SIPKD yang dijelaskanolehKepalaBidangAkuntansi
 BPKAD KabupatenKuningan.

SistemInformasiKeuangan Daerah yang disingkat SIPKD adalahsuatusistem
 yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, sertamengolah data
 pengelolaankeuangandaerahan data terkaitlainnyamenjadiinformasi yang

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Selain itu dijelaskan pula informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksinya atau fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini (Sri Dewi Wahyundaru, 2001).

Dalam situs resmi

HUMAS

SETDA

Kabupaten Kuningan Menjelaskan sosialisasi kebijakan akuntansi

“Kegiatan Sosialisasi tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah bertujuan agar

semua pengguna anggaran dan pelaksana anggaran, dalam melaksanakan pencatatan maupun

penerapannya di daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan

yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, ketua pelaksana mengatakan pengelolaan keuangan daerah pada tingkat

pemerintah daerah mempunyai dan melaksanakan system

pengelolaan keuangan yang

baik. Adapun pondasi utama pelaksanaan manajemen keuangan adalah terlaksananya

system akuntansi sebagai suatu sistem yang dapat menghasilkan dan menyajikan laporan

yang dapat digunakan sebagai sarana membantu perencanaan,

alat pengendalian dan pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan yang tepat.”

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan (Penelitian Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penerapan informasi pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sector publik akan berpengaruh terhadap kinerja pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut.

Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi setelah penerapan sistem informasi akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan kinerja pengambilan keputusan sebelum penerapan sistem informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah kabupaten Kuningan.
2. Bagaimana pengambilan keputusan pada pemerintah kabupaten Kuningan.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap pengambilan keputusan pada Pemerintah Kabupaten setempat.

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk membantupencapaian tujuan penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengambilan keputusan pada pemerintah kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap kinerja pengambilan keputusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian penulis paparkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi, dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah solusi dan rekomendasi untuk upaya peningkatan penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan khususnya di pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.